

DAMPAK KEGIATAN TUMPANGSARI EMPANG PARIT
PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PENDAPATAN
DAN SIKAP PENGGARAP-BUKAN PENGGARAP
(STUDI KASUS PERHUTANAN SOSIAL DI MAYANGAN-PAMANUKAN)

Oleh

Achmad Novel *)

PENDAHULUAN

Multi-fungsi dari hutan mangrove dan peranannya di dalam ekosistem pantai semakin nyata dan potensial, sehingga kelestariannya perlu diperhatikan dan dipertahankan.

Dalam pengelolaan hutan mangrove di RPH Bobos, BKPH Ciasem Pamanukan, KPH Purwakarta yang termasuk wilayah administratif Kecamatan Pamanukan seluas 2 174.6 ha banyak dijumpai permasalahan, antara lain banyaknya petani penggarap yang bukan berasal dari daerah sekitar hutan tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat sebagai buruh empang dan masih adanya pencurian kayu untuk kebutuhan kayu bakar.

Sebagai salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, Perum Perhutani telah melaksanakan program Perhutanan Sosial dalam bentuk tumpangsari empang parit seluas 15 ha (Perum Perhutani, 1986). Kegiatan ini diharapkan memberikan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan bagi penggarapnya dan mengurangi tekanan penduduk terhadap hutan mangrove berupa pencurian kayu bakar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani penggarap akibat adanya program Perhutanan Sosial di Desa Mayangan (RPH Bobos) dan perbedaan pendapatan rumah tangga penggarap dan bukan penggarap se-sudah program Perhutanan Sosial serta mengetahui sikap penggarap dan bukan penggarap terhadap adanya kegiatan reboasasi tumpangsari empang parit.

*) Mahasiswa S1 Fakultas Kehutanan IPB di bawah bimbingan Ir Chamim Mashar dan Dr Ir Sanusi Wiradinata MSc.

METODA PENELITIAN

Pengambilan contoh responden dilakukan dengan menggunakan metoda simple random sampling terhadap 53 KK yang terdapat di Kampung Terusan Desa Mayangan, di mana jumlah sampel ditentukan dari hasil sampling pendahuluan terhadap 12 KK. Dari hasil sampling pendahuluan tersebut didapat jumlah responden terpilih sebanyak 30 KK, di mana terdapat 4 KK sebagai penggarap dan 26 KK bukan penggarap.

HASIL PENELITIAN

Pada kondisi awal, luas efektif empang parit 1.4 ha dengan jumlah penggarap 17 KK sehingga luas garapan per KK 0.08 ha dan pendapatan yang diperoleh setiap penggarap adalah Rp 1 380.-/HOK atau 69 % dari upah buruh harian lepas per HOK (upah buruh = Rp 2 000.-/HOK). Maka banyak penggarap yang mengundurkan diri karena tidak tertarik dengan hasil yang diperolehnya. Pada kondisi akhir, dengan jumlah penggarap 5 KK dan luas garapan per KK 0.28 ha diperoleh pendapatan sebesar Rp 4 693.-/HOK atau 235 % dari upah buruh harian lepas per HOK.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian dengan uji-t terhadap selisih pendapatan penggarap sebelum dan sesudah program Perhutanan Sosial, ternyata rata-rata pendapatan penggarap meningkat sesudah adanya program Perhutanan Sosial sebesar Rp 273 493.-/tahun atau 16.73 % dari keadaan sebelumnya. Adapun besarnya pendapatan sebelum program Perhutanan Sosial adalah Rp 1 634 572.-/tahun dan sesudah program Perhutanan Sosial adalah Rp 1 908 065.-/tahun. Peningkatan pendapatan ini bersamaan dengan peningkatan curahan tenaga kerja, yaitu sebesar 164 HOK, sehingga setiap tenaga kerja mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 1 668.-/HOK atau 83.40% dari upah buruh harian lepas per HOK. Adapun jumlah curahan tenaga kerja yang digunakan setiap penggarap sebelum dan sesudah program Perhutanan Sosial rata-rata sebesar 345 HOK/tahun. Rata-rata curahan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh setiap penggarap untuk mengelola tumpangsari empang parit adalah 144 HOK/tahun atau 28.29 % dari total curahan tenaga kerja (509 HOK), sehingga rata-rata pendapatan yang diperoleh adalah Rp 4 693.-/HOK atau 235 % dari upah buruh harian lepas per HOK (pendapatan dari Perhutanan Sosial adalah Rp 675 742.- per tahun).

Sumbangan pendapatan dari program Perhutanan Sosial terhadap total pendapatan rata-rata sebesar 35.41 % untuk setiap penggarap tumpangsari empang parit.

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji-t terhadap rata-rata pendapatan penggarap dan bukan penggarap sesudah program Perhutanan Sosial, ternyata rata-rata pendapatan penggarap empang parit lebih besar dari rata-rata pendapatan bukan penggarap yaitu sebesar Rp 806 142.- per tahun.

Berdasarkan kebutuhan pangan minimum menurut Sajogyo (1977), maka keadaan keluarga penggarap sebelum dan sesudah program Perhutanan Sosial dinyatakan sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan minimum, karena rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun setiap penggarap setara beras sebelum dan sesudah program Perhutanan Sosial masing-masing sebesar 663 kg dan 713 kg.

Sikap penggarap empang parit terhadap pelaksanaan reboasasi pada lahan hutan yang rusak adalah 75 % menyatakan sikap setuju sekali dan 25 % menyatakan sikap setuju. Sikap bukan penggarap terhadap pelaksanaan reboasasi pada lahan hutan yang rusak adalah 26.92 % menyatakan sikap setuju sekali, 65.38 % menyatakan sikap setuju dan 3.85 % menyatakan sikap tidak setuju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Dengan adanya program Perhutanan Sosial terdapat peningkatan rata-rata pendapatan petani penggarap sebesar Rp 273 493.-/tahun atau 16.73 %.
- Ada perbedaan nyata antara rata-rata pendapatan penggarap dan bukan penggarap tumpangsari empang parit sesudah program Perhutanan Sosial, di mana rata-rata pendapatan penggarap lebih besar Rp 806 142.-/tahun dibandingkan dengan rata-rata pendapatan bukan penggarap.
- Sikap penggarap empang parit terhadap pelaksanaan reboasasi pada lahan hutan yang rusak adalah 75 % menyatakan sikap setuju sekali dan 25 % menyatakan sikap setuju. Sikap bukan penggarap terhadap pelaksanaan reboasasi pada lahan hutan yang rusak adalah 26.92 % menyatakan sikap setuju sekali, 65.38 % menyatakan sikap setuju dan 3.85 % menyatakan sikap tidak setuju.

Saran

- Berdasarkan pendapatan dan luas areal garapan yang diperoleh setiap penggarap pada kondisi akhir program Perhutanan Sosial serta hubungannya dengan upah buruh harian lepas per HOK di Desa Mayangan, maka dalam pengelolaan tumpangsari empang parit program Perhutanan Sosial di RPH Bobos, hendaknya luas areal garapan untuk setiap petani penggarap minimum 0.12 ha.
- Perlunya peningkatan teknis dalam pengelolaan empang parit bagi setiap penggarap agar hasil yang diperoleh lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan empang parit pada kondisi akhir program Perhutanan Sosial ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1987. Program Pengembangan Perhutanan Sosial (Social Forestry) di Indonesia. Rapat Kerja Kehutanan Departemen Kehutanan. Perum Perhutani, Jakarta.
- Perum Perhutani. 1986. Laporan Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial. Departemen Kehutanan cq. Perum Perhutani-Ford Foundation, Jakarta.
- Sajogyo. 1977. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, Bogor.